



DAMPAK SISTEMIK KORUPSI TERHADAP IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Ismiatun Maftuhah¹, Putri Ayu Ningsih²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A PagarAlam NO.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email : 29021022@student.ubl.ac.id¹, 292021036@student.ubl.ac.id²

Abstract. Corruption remains a structural issue that continues to be a major obstacle to national development. Its impact is not limited to state financial losses but also affects bureaucratic effectiveness, legal certainty, the quality of public services, and investor confidence. This article aims to analyze the systemic impact of corruption on the investment climate and national economic growth. This study employs a normative legal approach combined with a simple empirical approach through interviews to strengthen the analysis. Data were obtained through literature reviews of legislation, books, scientific journals, official reports from state and international institutions, as well as limited interviews with informants who understand issues of governance, bureaucracy, and investment. The findings indicate that corruption creates high economic costs, worsens bureaucratic efficiency, diminishes legal certainty, and hinders investment attractiveness. Furthermore, corruption results in low-quality public spending, disrupted infrastructure development, and a slowdown in national economic growth. Therefore, the fight against corruption must be positioned not only as a legal agenda but also as a vital strategy for improving the investment climate and strengthening the foundations of sustainable national economic growth.

Keywords: corruption, investment, economic growth, national development, governance

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang terus menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional. Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga memengaruhi efektivitas birokrasi, kepastian hukum, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan investor. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistemik korupsi terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris sederhana melalui wawancara untuk memperkuat analisis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga negara dan internasional, serta hasil wawancara terbatas dengan narasumber yang memahami isu tata kelola, birokrasi, dan investasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi menciptakan biaya ekonomi tinggi, memperburuk efisiensi birokrasi, menurunkan kepastian hukum, dan menghambat daya tarik investasi. Selain itu, korupsi juga berdampak terhadap rendahnya kualitas belanja publik, terganggunya pembangunan infrastruktur, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus diposisikan tidak hanya sebagai agenda hukum, tetapi juga sebagai strategi penting dalam memperbaiki iklim investasi dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: korupsi, investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, tata kelola pemerintahan

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan paling kompleks yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini bisa terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, serta pelanggaran terhadap norma-norma

yang berlaku, demi keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. ¹Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan atau perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga menyangkut kerusakan sistemik dalam tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pembangunan nasional. Korupsi telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang berdampak terhadap aspek hukum, sosial, politik, dan ekonomi.²

Di Indonesia, korupsi menjadi isu yang terus mendapat perhatian luas karena frekuensi kasusnya yang tinggi dan dampaknya yang sangat merugikan negara. Praktek akuntansi publik pada pemerintah pusat dan daerah telah menyisakan masalah berupa *fraud* (korupsi) diberbagai sektor, seperti: pendidikan, transportasi, maritim, kesehatan, perbankan, pertanahan, pertanian, hukum dan sektor lainnya, sehingga Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menjadi salah satu negara di dunia dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. ³Berbagai kasus korupsi yang terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, perpajakan, perizinan, hingga pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar tindakan individu, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi kualitas tata kelola pemerintahan. Praktik korupsi yang terjadi secara berulang dalam berbagai sektor memperlihatkan bahwa persoalan ini telah memiliki sifat sistemik.

Dalam perspektif ekonomi, korupsi memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar kerugian finansial negara. Korupsi dapat menciptakan ketidakefisienan ekonomi, memperburuk kualitas belanja publik, menghambat pembangunan infrastruktur, dan menurunkan produktivitas nasional. Lebih dari itu, korupsi juga dapat merusak iklim investasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁴

Investasi, baik domestik maupun asing, memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi. Investasi berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja,

¹ Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 . hlm. 01.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

³ Hasan, Z, dkk. (2025). *Mereduksi Korupsi Untuk Keberlanjutan Di Indonesia*. Hlm. 02.

⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 41.

peningkatan produksi, transfer teknologi, pertumbuhan industri, serta peningkatan pendapatan negara. Namun, masuknya investasi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola negara. Investor pada dasarnya membutuhkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, birokrasi yang efisien, dan lingkungan usaha yang transparan. Dalam situasi di mana korupsi masih kuat mengakar, investor akan memandang suatu negara sebagai wilayah berisiko tinggi untuk aktivitas bisnis.⁵

Korupsi menciptakan apa yang dikenal sebagai ekonomi biaya tinggi. Dalam sistem yang koruptif, pelaku usaha tidak hanya dibebani oleh biaya resmi seperti pajak, administrasi, dan biaya operasional, tetapi juga berpotensi menghadapi biaya informal berupa suap, uang pelicin, atau gratifikasi agar proses bisnis dapat berjalan lancar. Kondisi ini tentu mengganggu efisiensi usaha dan menurunkan minat investasi. Bagi investor asing, praktik semacam ini menjadi sinyal negatif yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam memilih negara tujuan investasi.

Selain berdampak pada investasi, korupsi juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang sehat membutuhkan sistem pengelolaan sumber daya yang efisien, distribusi anggaran yang tepat sasaran, serta institusi yang mampu bekerja secara profesional. Namun, korupsi menyebabkan terjadinya distorsi alokasi sumber daya. Proyek pembangunan yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dapat bergeser menjadi alat untuk memenuhi kepentingan politik atau ekonomi kelompok tertentu. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan menjadi tidak efektif, kualitas infrastruktur menurun, dan manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat menjadi tidak optimal.⁶

Korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat sering kali tidak sampai secara utuh kepada kelompok yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melemahkan kualitas sumber

⁵ M. H. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 233.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27.

daya manusia, menurunkan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih jauh lagi, korupsi juga berkaitan erat dengan persoalan kepercayaan. Kepercayaan investor, kepercayaan dunia usaha, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Ketika korupsi menjadi praktik yang dianggap biasa dalam birokrasi dan pelayanan publik, maka kepercayaan terhadap institusi negara akan terus menurun. Penurunan kepercayaan ini bukan hanya berbahaya bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat menghambat reformasi struktural yang dibutuhkan untuk memperkuat daya saing nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum atau moral, tetapi juga masalah ekonomi yang berdampak sistemik terhadap masa depan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana korupsi memengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk menekan dampak buruknya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana korupsi sebagai persoalan sistemik memengaruhi iklim investasi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?
3. Bagaimana pandangan narasumber mengenai pengaruh korupsi terhadap dunia usaha dan pembangunan ekonomi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris sederhana. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, konsep, teori, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, investasi, dan pembangunan ekonomi nasional. Pendekatan ini penting karena isu korupsi tidak dapat dilepaskan dari

aspek hukum sebagai instrumen pengaturan dan penindakan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris sederhana melalui wawancara terbatas guna memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana korupsi dipersepsikan memengaruhi birokrasi, aktivitas usaha, pelayanan publik, serta kepercayaan terhadap dunia investasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif, tetapi juga menghadirkan sudut pandang praktis dari lapangan.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan korupsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi memiliki dimensi sosial, hukum, dan institusional yang saling berkaitan sehingga tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat serta keterkaitan antarvariabel untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dampak korupsi terhadap iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Korupsi sebagai Persoalan Sistemik dalam Tata Kelola Negara

Korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Ruang lingkupnya meliputi: a) Perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum; b) Penyalahgunaan wewenang; c) Gratifikasi; d) Kerugian keuangan negara; e) Suap-menyuap⁷. Akan tetapi, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diberantas karena telah berakar dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.⁸ Tindak pidana korupsi bisa diakibatkan oleh berbagai factor berikut

⁷ Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus, hlm. 03.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ini, yaitu: Faktor Pribadi Manusia, Faktor Keluarga dan Masyarakat, Faktor Ekonomi dan Politik, Faktor Organisasi.⁹

Korupsi disebut sebagai persoalan sistemik ketika praktiknya tidak lagi berdiri sebagai tindakan individu semata, tetapi telah menjadi bagian dari pola kerja birokrasi, pelayanan publik, dan relasi kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, korupsi dapat muncul dalam bentuk suap, gratifikasi, pengaturan proyek, manipulasi pengadaan, penyalahgunaan anggaran, hingga jual beli jabatan. Persoalan ini menjadi berbahaya karena dapat merusak fungsi dasar institusi negara.

Ketika korupsi telah merasuk ke dalam sistem birokrasi, maka pengambilan keputusan publik tidak lagi semata-mata didasarkan pada kepentingan masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi-politik tertentu. Akibatnya, kualitas kebijakan publik menurun, birokrasi menjadi tidak efisien, dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan secara optimal. Hal ini tentu berimplikasi langsung pada dunia usaha dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan nasional, korupsi sistemik menyebabkan kebocoran anggaran, menurunkan kualitas proyek publik, dan menghambat efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya mengganggu jalannya pemerintahan, tetapi juga merusak fondasi ekonomi negara secara menyeluruh.

B. Pengaruh Korupsi terhadap Iklim Investasi

1. Korupsi Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi

Salah satu dampak paling nyata dari korupsi terhadap iklim investasi adalah terciptanya ekonomi biaya tinggi. Dalam lingkungan yang koruptif, investor atau pelaku usaha sering kali tidak cukup hanya memenuhi persyaratan resmi, tetapi juga dipaksa menghadapi biaya tambahan di luar aturan yang berlaku. Biaya tambahan ini dapat berupa uang pelicin, suap, gratifikasi, atau biaya informal lainnya agar proses administrasi dan perizinan dapat berjalan lancar.¹⁰

Kondisi ini menyebabkan dunia usaha tidak berjalan dalam mekanisme yang sehat dan efisien. Pelaku usaha harus mengalokasikan biaya yang seharusnya tidak perlu,

⁹ Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan. Vol 4, No 6 (2024). hlm 03.

¹⁰ Vito Tanzi, "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures," IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4 (1998), hlm. 564.

sehingga menurunkan efisiensi produksi dan profitabilitas usaha. Bagi investor besar, hal ini akan menurunkan daya tarik negara tujuan investasi. Sementara bagi pelaku usaha kecil, biaya-biaya informal seperti ini dapat menjadi hambatan serius untuk berkembang.

Ekonomi biaya tinggi yang lahir dari korupsi pada akhirnya merusak kompetisi usaha yang sehat. Perusahaan yang jujur dan patuh terhadap aturan bisa kalah bersaing dengan pihak-pihak yang lebih dekat dengan kekuasaan atau lebih mampu melakukan praktik suap. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan struktur ekonomi nasional.

2. Korupsi Menurunkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat utama dalam membangun iklim investasi yang kondusif. Investor membutuhkan jaminan bahwa aturan akan diterapkan secara konsisten, kontrak akan dihormati, dan sengketa bisnis dapat diselesaikan secara adil. Namun, praktik korupsi justru merusak prinsip-prinsip dasar tersebut.¹¹

Dalam sistem yang koruptif, hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Keputusan administratif, proses perizinan, bahkan penyelesaian sengketa dapat menjadi tidak objektif apabila terdapat intervensi, transaksi, atau penyalahgunaan kewenangan. Akibatnya, dunia usaha kehilangan kepastian mengenai bagaimana aturan akan diterapkan.

Ketidakpastian hukum menjadi faktor yang sangat merugikan investor. Dalam aktivitas bisnis, investor perlu memperhitungkan risiko. Jika sistem hukum tidak dapat diprediksi, maka risiko investasi akan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan investasi, khususnya investasi jangka panjang.

3. Korupsi Menghambat Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha atau *ease of doing business* merupakan indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan usaha suatu negara. Negara yang memiliki prosedur perizinan sederhana, transparan, cepat, dan efisien akan lebih menarik bagi investor. Sebaliknya, birokrasi yang berbelit dan rawan korupsi akan mengurangi minat investasi.¹²

Korupsi sering kali muncul dalam proses-proses administratif yang berkaitan dengan usaha, seperti pengurusan izin, sertifikasi, perpajakan, pengadaan lahan, bea

¹¹ Susan Rose-Ackerman, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 91

¹² World Bank, *Worldwide Governance Indicators and Investment Climate Reports*, berbagai edisi.

cukai, dan pelayanan lainnya. Ketika prosedur dibuat rumit dan tidak transparan, maka peluang terjadinya pungutan liar dan penyalahgunaan kewenangan menjadi lebih besar. Bagi investor, hambatan birokrasi seperti ini bukan hanya memperlambat proses bisnis, tetapi juga meningkatkan ketidakpastian dan biaya operasional. Akibatnya, negara akan kehilangan peluang untuk menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas basis ekonomi nasional.

C. Dampak Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

1. Menurunkan Efektivitas Belanja Publik

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada efektivitas belanja publik. Negara memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai layanan dasar lainnya. Namun, ketika korupsi terjadi dalam pengelolaan anggaran negara, maka efektivitas belanja publik akan menurun secara signifikan.¹³

Korupsi dalam belanja publik dapat berbentuk mark-up anggaran, proyek fiktif, manipulasi tender, pengurangan kualitas barang dan jasa, serta penyelewengan dana pembangunan. Akibatnya, proyek yang dibangun sering kali tidak sesuai spesifikasi, cepat rusak, atau bahkan tidak selesai. Hal ini tentu merugikan masyarakat sekaligus menurunkan dampak ekonomi yang seharusnya dihasilkan dari pembangunan tersebut.

Belanja publik yang tidak efektif berarti negara gagal mengoptimalkan fungsi fiskalnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang buruk akan meningkatkan biaya logistik, pendidikan yang rendah akan menurunkan kualitas tenaga kerja, dan layanan kesehatan yang lemah akan memengaruhi produktivitas masyarakat.

2. Menurunkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Korupsi juga berdampak terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Dalam sistem ekonomi yang sehat, sumber daya harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang paling produktif dan mampu memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Namun, korupsi menyebabkan alokasi sumber daya sering kali tidak didasarkan pada efisiensi, melainkan pada kedekatan politik atau transaksi kepentingan.¹⁴

¹³ Paolo Mauro, "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure," IMF Working Paper, 1997, hlm. 8.

¹⁴ Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters," World Bank Policy Research Working Paper, berbagai edisi.

Sebagai contoh, proyek-proyek strategis dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak kompeten hanya karena faktor kedekatan atau praktik suap. Akibatnya, kualitas hasil kerja menurun dan efisiensi ekonomi terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menghambat inovasi, memperlambat pertumbuhan sektor produktif, dan menurunkan daya saing nasional di tingkat global.

Korupsi juga merusak semangat kompetisi yang sehat. Pelaku usaha yang jujur akan merasa dirugikan apabila sistem lebih menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses tidak sehat terhadap kekuasaan. Hal ini dapat melemahkan iklim usaha secara keseluruhan.

3. Memperlebar Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dari sisi angka pertumbuhan, tetapi juga dari kualitas distribusi hasil pembangunan. Korupsi cenderung memperbesar ketimpangan karena manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sementara kelompok rentan justru kehilangan hak-haknya.¹⁵

Ketika dana publik yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat bocor akibat korupsi, maka kelompok miskin menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperburuk kemiskinan, menghambat mobilitas sosial, dan melemahkan basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai ketimpangan tinggi pada dasarnya adalah pertumbuhan yang rapuh. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi penting bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara adil dan merata.

D. Korupsi, Investasi, dan Kualitas Institusi Negara

Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah bahwa hubungan antara korupsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kualitas institusi negara. Institusi yang kuat adalah fondasi utama bagi pembangunan ekonomi modern. Institusi yang dimaksud mencakup birokrasi, sistem hukum, aparat penegak hukum,

¹⁵ Transparency International, Corruption Perceptions Index Reports, berbagai edisi.

lembaga pengawas, dan seluruh mekanisme tata kelola publik yang memengaruhi dunia usaha.¹⁶

Negara dengan institusi yang lemah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Sebaliknya, negara dengan institusi yang kuat akan lebih mampu menekan korupsi dan menciptakan kepastian bagi investor. Dalam konteks ini, kualitas institusi berperan sebagai penentu utama apakah suatu negara mampu membangun iklim investasi yang sehat atau justru terjebak dalam pola pembangunan yang tidak efisien.

Korupsi pada dasarnya adalah gejala dari lemahnya institusi. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada pembenahan sistem. Tanpa perbaikan institusi, korupsi akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda dan tetap menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan persoalan sistemik yang berdampak luas terhadap iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks investasi, korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi, menurunkan kepastian hukum, melemahkan kepercayaan investor, dan menghambat kemudahan berusaha. Akibatnya, iklim usaha menjadi tidak sehat dan minat investasi dapat menurun. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional, korupsi menurunkan efektivitas belanja publik, memperburuk kualitas pembangunan, menurunkan produktivitas, serta memperbesar ketimpangan sosial-ekonomi. Korupsi juga merusak kualitas institusi negara, yang pada akhirnya melemahkan fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang. Hasil kajian normatif yang diperkuat dengan wawancara terbatas menunjukkan bahwa dampak korupsi benar-benar dirasakan dalam kehidupan ekonomi dan birokrasi. Dengan demikian, korupsi harus dipahami bukan hanya sebagai masalah hukum, tetapi juga sebagai hambatan strategis terhadap pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Hasan, Z, dkk. (2025). Mereduksi Korupsi Untuk Keberlanjutan Di Indonesia. Hlm.02

¹⁶ Asian Development Bank, Anticorruption Policy and Economic Governance, Manila, berbagai edisi.

- Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 . hlm. 01.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus, hlm. 03.

Jurnal:

- Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 27.
Asian Development Bank, Anticorruption Policy and Economic Governance, Manila, berbagai edisi.
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 155.
Daniel Kaufmann, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi, "Governance Matters," World Bank Policy Research Working Paper, berbagai edisi.
Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.
Hasan, Z, dkk. (2025). Mereduksi Korupsi Untuk Keberlanjutan Di Indonesia. Hlm. 02.
Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan. Vol 4, No 6 (2024). hlm 03.
Hasan, Z. (2025). Pendidikan Anti Korupsi : Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 . hlm. 01.
Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus, hlm. 03.
Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 41.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 233.
Paolo Mauro, "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure," IMF Working Paper, 1997, hlm. 8.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 10.
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 224.
Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 91
Transparency International, Corruption Perceptions Index Reports, berbagai edisi.
Vito Tanzi, "Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures," IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 4 (1998), hlm. 564.
World Bank, Worldwide Governance Indicators and Investment Climate Reports, berbagai edisi.